



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 29 Maret 2026/Periodik - 2025)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF

LEMBAGA : BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR (BAPETEN)

UNIT KERJA : DEPUTI PENGKAJIAN KESELAMATAN NUKLIR

I. DATA PRIBADI

1. Nama : **HAENDRA SUBEKTI**
2. Jabatan : **DEPUTI**
3. NHK : **804045**

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN **Rp. 3.196.900.000**

1. Tanah dan Bangunan Seluas 72 m2/120 m2 di KAB / KOTA KOTA TANGERANG , HASIL SENDIRI Rp. 878.400.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 130 m2/100 m2 di KAB / KOTA SLEMAN, Rp. 1.006.000.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 78 m2/78 m2 di KAB / KOTA SLEMAN, Rp. 675.000.000
4. Tanah Seluas 425 m2 di KAB / KOTA SLEMAN, Rp. 637.500.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN **Rp. 226.700.000**

1. MOTOR, HONDA REVO Tahun 2013, HASIL SENDIRI Rp. 3.700.000
2. MOBIL, DAIHATSU TARUNA Tahun 2000, HASIL SENDIRI Rp. 43.000.000
3. MOBIL, MITSUBISHI XPANDER Tahun 2018, HASIL SENDIRI Rp. 180.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA **Rp. 120.000.000**

D. SURAT BERTHARGA **Rp. ----**

E. KAS DAN SETARA KAS **Rp. 200.000.000**

F. HARTA LAINNYA **Rp. ----**

Sub Total **Rp. 3.743.600.000**

III. HUTANG **Rp. 100.000.000**

**IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)**

Rp.

3.643.600.000

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.